

**PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN
INSTITUSIONAL, DAN KEBIJAKAN HUTANG
TERHADAP TAX AGGRESSIVE**

(Studi Empiris Pada Perusahaan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Periode 2011-2013)

Oleh :

Jeane Atari

Pembimbing : Azwir Nasir dan Elfi Ilham

Faculty of Economic, Riau University, Pekanbaru, Indonesia

e-mail: jeaneatari@yahoo.co.id

*The Effect of Managerial Ownership, Institutional Ownership and Debt Policy on
Tax Aggressive (Empirical Study on Transportation Companies
Listed on Indonesia Stock Exchange Period 2011-2013)*

ABSTRACT

This study aimed to determine the influence of managerial ownership, institutional ownership and debt policy on the tax aggressive. Independent variables used in this study are managerial ownership, institutional ownership and debt policy, while the dependent variable in this study is tax aggressive are measured using Effective Tax Rate (ETR). Populations used in this study is transportation companies listed on IDX 2011-2013 where the total population is used by 14 companies. The sampling technique used was purposive sampling technique in which the number of observations obtained this study was 42 (14x3). Data analysis conducted with multiple regression model with help of software SPSS version 20,0. Of the result of the testing that has been done, the partial regression test (t test) showed that the independent variables managerial ownership, institutional ownership and debt policy which has a significant influence on tax aggressive.

Keywords : Managerial Ownership, Institutional Ownership, Debt Policy, Tax Aggressive, and Effective Tax Rate

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Fitrios dan Rusli, 2007:15). Bagi rakyat

sebagai wajib pajak sendiri, pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk ikut berkontribusi dalam peningkatan pembangunan nasional. Sedangkan bagi pihak pemerintah, untuk melaksanakan tanggung jawab negara di berbagai sektor kehidupan untuk mencapai kesejahteraan umum.

Pajak penghasilan disetorkan perusahaan kepada negara yang merupakan proses transfer kekayaan dari pihak perusahaan kepada negara, sehingga bisa dikatakan pembayaran pajak penghasilan ini merupakan biaya bagi perusahaan dan pemilik perusahaan. Oleh karenanya pemilik perusahaan diduga akan cenderung lebih suka manajemen perusahaan melakukan tindakan pajak agresif (Sari dan Martani, 2010).

Tindakan *tax aggressive* adalah suatu tindakan yang didesain untuk mengurangi penghasilan kena pajak (PKP) dengan perencanaan pajak yang dilakukan sesuai, dimana yang diklasifikasikan ataupun tidak diklasifikasikan sebagai *tax evasion* (Frank et al. 2009). Walau tidak semua tindakan yang melanggar peraturan, namun semakin banyak celah yang digunakan ataupun semakin besar penghematan yang dilakukan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak.

Praktik tindakan pajak agresif yang terjadi sebenarnya cukup banyak, baik itu penghindaran pajak secara legal (*avoidance*) ataupun secara ilegal (*evasion*). Praktik penghindaran pajak yang lagi gencar-gencarnya adalah praktik penghindaran pajak oleh *Microsoft* di China.

Microsoft dijatuhi denda hingga sebesar 1.7 trilyun rupiah oleh pemerintah Cina karena telah melakukan penggelapan pajak lintas negara. Informasi ini diperoleh dari Official News Agency China Xinxua. Xinxua menyatakan bahwa sebuah perusahaan dengan huruf depan "M", merupakan salah satu dari 500 perusahaan terbesar dunia, dan telah membangun anak perusahaan di Beijing sejak tahun 1995, telah

dijatuhi denda 840 juta yuan (sekitar 1.7 trilyun rupiah) karena melakukan penggelapan pajak, dan kedepannya harus membayar 100 juta yuan (sekitar 200 miliar rupiah) per tahun secara rutin untuk pembayaran pajak. Dari ciri-ciri tersebut, hanya *Microsoft* saja yang masuk dalam kriterianya. Xinxua menyatakan bahwa perusahaan "M" tersebut selalu melaporkan mengalami kerugian di China selama 6 tahun berturut-turut. Namun otoritas pajak menyimpulkan hal ini janggal dan tidak wajar karena di negara lain perusahaan itu selalu melaporkan dan menikmati keuntungan yang diperolehnya (www.winpoint.com).

Dari fenomena yang terjadi di atas, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan kewajiban - kewajiban perpajakannya. Faktor-faktor itu adalah: Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Kebijakan Hutang.

Ada konflik kepentingan yang muncul antara pemegang saham (prinsipal) dengan manajer perusahaan (agen) yang menjadikan manajer kemungkinan melakukan tindakan yang dapat meningkatkan kesejahteraannya, yaitu dengan cara mengorbankan beberapa kepentingan pemegang saham tersebut.

Ada beberapa metode yang bisa digunakan agar dapat menghilangkan permasalahan - permasalahan agensi dan menurunkan biaya yang berkenaan dengan agensi. Pertama, melalui pengendalian eksternal (*external control*) atau mekanisme motivasional. Hal ini dilakukan agar dapat menyelaraskan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham, yaitu dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajer

pada perusahaan. Ketika kepemilikan dan manajemen berbeda maka terjadi ketidak efisienan yang akan menciptakan kesempatan bagi manajer untuk melakukan tindakan pajak agresif.

Dari penelitian yang dilakukan Hartadinata dan Heru (2013) mendapatkan bahwa semakin tinggi rasio kepemilikan manajerial maka akan semakin tinggi tingkat keagresifan pajak. Sedangkan menurut penelitian dari Baharuddin (2015) mendapatkan hasil bahwa kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh yang negatif terhadap *tax avoidance*, yang artinya manajemen cenderung akan lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Faktor lainnya yang juga dapat mempengaruhi pajak agresif adalah kepemilikan institusional.

Kepemilikan saham oleh pihak institusional mempunyai arti yang penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh pihak institusional memberikan dorongan peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Tingkat kepemilikan saham oleh pihak institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga bisa dapat menghalangi perilaku *opportunistic*. Menurut Khurana dan Moser (2009) tindakan pajak agresif berkaitan pada besarnya kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusional. Pemegang saham institusional jangka pendek mempengaruhi pihak manajemen perusahaan untuk menjadi lebih agresif dalam melakukan upaya untuk dapat memaksimalkan nilai perusahaan dalam jangka pendek. Namun, pemegang saham oleh pihak institusional yang investasinya dalam

jangka panjang akan dapat mencegah perusahaan dalam melakukan pajak agresif.

Hasil penelitian Sabrina dan Gatot (2013) menemukan hasil bahwa kepemilikan saham oleh Institusional tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap tindakan pajak agresif. Tidak sejalan dengan hasil penelitian Sabrina dan Gatot (2013), menurut hasil penelitian dari Pranata dkk (2014) kepemilikan saham oleh pihak institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selain ingin melihat pengaruh dari kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap tindakan pajak agresif, peneliti juga ingin meneliti pengaruh kebijakan hutang terhadap tindakan pajak agresif karena dirasa hal tersebut masih sangat menarik untuk dijadikan penelitian sebab masih sedikit peneliti yang meneliti variabel ini.

Kebijakan hutang dapat menggambarkan keputusan yang diambil oleh pihak manajemen agar dapat menentukan sumber-sumber pendanaannya. Kebijakan hutang ini dilakukan untuk menambah dana perusahaan yang akan digunakan untuk dapat memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Disamping itu perusahaan memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman dan harus membayar beban bunganya secara periodik. Adanya kewajiban tersebut membuat manajer berupaya untuk meningkatkan laba sehingga dapat memenuhi kewajiban dari penggunaan hutang. Beban bunga tersebut dapat sekaligus berfungsi menurunkan biaya pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Dari hasil penelitian oleh Hartadinata dan Heru (2013), menemukan bahwa

kebijakan hutang memiliki pengaruh negatif terhadap *tax aggressive*. Tapi, Hasil penelitian dari Hartadinata dan Heru (2013) menyatakan hal yang berbanding terbalik dengan teori.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Hartadinata dan Tjaraka tahun 2013. Penelitian yang dilakukannya adalah mengenai pengaruh kepemilikan manajerial, kebijakan hutang, dan ukuran perusahaan terhadap *tax aggressiveness* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2010. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini tidak memasukan ukuran perusahaan sebagai variabel bebas karena sudah banyak yang melakukan penelitian menggunakan variabel tersebut, dan memasukan kepemilikan institusional sebagai variabel bebas yang mempunyai pengaruh terhadap *tax aggressive*, karena masih terdapat ketidak konsistenan hasil. Jadi dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga variabel bebas, yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kebijakan hutang. Lalu, variabel dependen yaitu *tax aggressive*. Dalam penelitian ini akan dilakukan pada perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013.

Alasan penelitian ini dilakukan pada perusahaan transportasi karena perusahaan transportasi merupakan perusahaan yang perkembangannya cukup pesat di Indonesia. Hal ini terbukti dengan dikembangkannya transportasi darat, laut, dan udara, misalnya busway, pesawat, kereta api, dan lain-lain. Berdasarkan data yang dihimpun, dari 11 emiten transportasi laut yang telah merilis

laporan keuangan, rerata laba bersih seluruh perusahaan tersebut pada kuartal I/2013 naik 19,19% dibandingkan dengan periode Januari-Maret 2012. Dari kesebelas emiten itu, pada PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya, Tbk membukukan pertumbuhan laba bersih yang signifikan dengan mencapai 236,73% menjadi US\$ 2,29 juta dari kinerja tahun sebelumnya, yaitu US\$ 680.418. (www.beritarayaonline.com).

Perusahaan transportasi juga merupakan perusahaan yang memiliki tingkat hutang yang cukup tinggi, sehingga akan menyebabkan perusahaan - perusahaan transportasi harus membayar pinjaman beserta bunganya yang akan berpengaruh ke pajak yang akan dikenakan pada perusahaan tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pajak agresif ?, 2) Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pajak agresif ?, 3) Apakah kebijakan hutang berpengaruh terhadap pajak agresif ?.

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Menguji hubungan kepemilikan manajerial terhadap pajak agresif, 2) Menguji hubungan kepemilikan institusional terhadap pajak agresif, 3) Menguji hubungan kebijakan hutang terhadap pajak agresif.

TELAAH PUSTAKA

Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap *Tax Aggressive*

Manajer dalam perusahaan memegang peran penting dalam menjalankan perusahaan, karena manajer dapat melakukan hal yang dapat memberikan keuntungan bagi

dirinya, yang tidak sejalan dengan keinginan pemegang saham. Keinginan manajemen lebih kepada pertumbuhan dan ukuran perusahaan, sedangkan pemegang saham lebih pada nilai perusahaan. Sehingga, melalui kebijakan itu adanya kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajerial, dapat membuat pihak manajerial berhati-hati dalam mengambil suatu tindakan *tax aggressive*, baik melalui perencanaan pajak menggunakan metode yang terklasifikasi atau tidak terklasifikasi. Karena, jika keputusan tindakannya salah, maka akan berdampak juga pada dirinya sendiri selaku pemegang saham.

Menurut hasil penelitian oleh Hartadinata dan Tjaraka (2013) memberikan suatu pernyataan bahwa kepemilikan manajemen memiliki pengaruh terhadap *tax aggressive*. Maka dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen pada perusahaan tersebut akan membuat manajemen lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan, karena manajemen akan ikut merasakan manfaat secara langsung dari keputusan yang telah diambil, karena manajemen juga akan ikut menanggung kerugian yang terjadi apabila keputusan yang diambil oleh mereka salah.

Dengan begitu kepemilikan manajerial bisa diharapkan dapat membuat pihak manajemen untuk mengesampingkan kepentingannya pribadi agar tidak terjadi *tax aggressive*. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan saham oleh manajerial pada suatu perusahaan dapat mempengaruhi terjadinya *tax aggressive*.

Berdasarkan pada kerangka pemikiran diatas dan didukung oleh

beberapa penelitian, maka dapat dibangun hipotesis pertama yaitu:

H1: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax aggressive*.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Aggressive*

Kepemilikan saham oleh pihak institusional dapat memainkan peran penting dalam melakukan pemantauan, mendisiplinkan, dan mempengaruhi pihak manajer. Dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak institusional di suatu perusahaan akan dapat mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Kepemilikan institusional dapat dijadikan sebagai mekanisme monitoring yang efektif dalam membuat dan pengambilan sebuah keputusan oleh pihak manajer didalam perusahaan.

Kepemilikan oleh pihak institusional pada dasarnya melihat seberapa jauh pihak manajemen taat kepada peraturan-peraturan dalam menghasilkan laba, salah satunya dengan mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Sehingga dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak institusional bias mencegah terjadinya *tax aggressive*. Menurut hasil dari penelitian yang dilakukan Khurana dan Moser (2009) adalah besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional tersebut maka akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif yang dilakukan perusahaan, dan semakin besarnya konsentrasi *short-term shareholder* institusional akan meningkatkan kebijakan pajak agresif, tetapi semakin besar konsentrasi pada kepemilikan *long-term shareholder* maka akan semakin mengurangi

tindakan kebijakan pajak yang agresif.

Berdasarkan pada kerangka pemikiran diatas dan didukung oleh beberapa penelitian, maka dapat dibangun hipotesis pertama yaitu:

H2: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax aggressive*.

Pengaruh Kebijakan Hutang Terhadap *Tax Aggressive*

Kebijakan hutang adalah kebijakan yang dapat menentukan seberapa besar akan kebutuhan dana perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Kemudian, perusahaan akan memiliki kewajiban - kewajiban untuk mengembalikan pinjaman dan membayar beban bunga secara periodik. Adanya kewajiban tersebut membuat manajer berupaya untuk meningkatkan laba sehingga dapat memenuhi kewajiban dari penggunaan hutang. Beban bunga itu sekaligus bisa berfungsi untuk menurunkan biaya pajak yang harus di tanggung oleh perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan hutang pada suatu perusahaan dapat mempengaruhi akan terjadinya *tax aggressive*. Menurut hasil penelitian Hartadinata dan Tjaraka (2013) pun menyatakan bahwa kebijakan hutang memiliki pengaruh terhadap *tax aggressive*. Keberadaan hutang juga dapat mengendalikan penggunaan *freecash flow* secara berlebihan oleh manajemen sehingga menghindari investasi yang sia-sia.

Berdasarkan pada kerangka pemikiran diatas dan didukung oleh beberapa penelitian, maka dapat dibangun hipotesis pertama yaitu:

H3: Kebijakan hutang berpengaruh terhadap *tax aggressive*.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Transportai yang terdaftar (*listing*) di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2011-2013. Berdasarkan pada *Indonesian Capital Market Directory* tahun 2013, diketahui jumlah populasi perusahaan Transportasi yang terdaftar di BEI berjumlah 32 perusahaan dan 14 perusahaan yang dapat dijadikan sebagai sampel penelitian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang tidak secara langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan dengan data tersebut (Kuncoro, 2013).

Sumber data sekunder ini berasal dari Bursa Efek Indonesia, *Annual Report* dan jurnal – jurnal penelitian.

Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

Tax Aggressive

Dalam penelitian ini cara pengukuran *tax aggressive* yaitu dengan menggunakan proksi ETR (*Effective Tax Rate*). Proksi ETR adalah proksi yang paling banyak digunakan dalam literatur, dan nilai yang rendah dari ETR dapat menjadi indikator adanya tindakan pajak agresif. Dengan begitu secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan yang melakukan penghindaran pajak perusahaan dengan mengurangi penghasilan kena pajak mereka dan dengan tetap menjaga laba akuntansi keuangan memiliki nilai ETR yang lebih rendah. Dengan demikian, ETR dapat digunakan untuk mengukur tindakan pajak agresif. ETR dihitung

dari beban pajak dibagi laba sebelum pajak.

$$ETR(it) = \frac{\text{Beban Pajak}_{i,t}}{\text{Laba Sebelum Pajak}_{i,t}}$$

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan saham oleh pihak manajerial adalah bagian kepemilikan saham biasa perusahaan oleh pihak *insider* (pihak manajemen) (Besley dan Brigham, 2007:146). Menurut Besley dan Brigham (2007:146) mendefinisikan *insider* sebagai pejabat perusahaan, para direksi, pemegang saham utama dan semua pihak yang mempunyai informasi dari dalam perusahaan atas operasi perusahaan.

Dalam penelitian ini, bahwa kepemilikan manajerial diukur dengan menggunakan *dummy variable* yaitu dengan memberikan nilai 1 untuk perusahaan yang terdapat kepemilikan manajerial dan nilai 0 untuk perusahaan yang tidak terdapat kepemilikan manajerial.

Kepemilikan Institusional

Investor pihak institutional biasanya terdiri dari perusahaan - perusahaan asuransi, lembaga - lembaga penyimpan dana (bank dan lembaga simpan pinjam), lembaga pensiun, maupun perusahaan investasi (Tandelilin, 2010:2).

Dalam penelitian ini, dapat dilihat bahwa kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan *dummy variable* yaitu dengan memberikan nilai 1 untuk perusahaan yang terdapat kepemilikan institusional dan nilai 0 untuk perusahaan tidak terdapat kepemilikan institusional.

Kebijakan Hutang

Hutang adalah pengorbanan manfaat ekonomi dimasa mendatang yang cukup pasti akan timbul dari kewajiban untuk menyerahkan aset atau memberikan jasa kepada entitas lain dimasa mendatang sebagai akibat dari transaksi atau peristiwa masa lampau (Bastian, 2006:78). Berarti kebijakan hutang adalah kebijakan yang menentukan seberapa besar kebutuhan dana perusahaan dibiayai oleh hutang. Kebijakan Hutang dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio sebagai berikut :

$$KH = \frac{\text{Total Hutang}_{i,t}}{\text{Total Aset}_{i,t}}$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik penelitian yang dapat digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan data – data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk mengambil kesimpulan - kesimpulan yang berlaku umum. Statistik deskriptif ini juga bertujuan untuk memberi gambaran tentang suatu data - data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, dll.

Berikut ini adalah hasil dari pengujian yang dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif. Adapun variabeln - variabelnya adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan hutang dan *tax aggressive*:

Tabel 1
Hasil Deskriptif Statistik

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KM	42	.0000	1.0000	.547619	.5037605
INST	42	.0000	1.0000	.523810	.5054867
KH	42	.1205	.8646	.539748	.1893029
ETR	42	.0434	.6740	.219443	.1732646
Valid N (listwise)	42				

Sumber : Data Olahan SPSS

Uji Normalitas Data

Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah data yang digunakan dalam model regresi telah terdistribusi normal. Dalam penelitian ini peneliti melakukan uji normalitas menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov*.

Tabel 2
Hasil Uji *Kolmogorov Smirnov*

		Unstandardized Residual
N		42
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000007
	Std. Deviation	.10458389
	Absolute	.160
Most Extreme Differences	Positive	.160
	Negative	-.098
Kolmogorov-Smirnov Z		1.034
Asymp. Sig. (2-tailed)		.235

Sumber : Data Olahan SPSS

Apabila hasil signifikansi dari uji kolmogorov Smirnov ini $> 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini telah terdistribusi dengan normal.

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa signifikansi dari uji kolmogorov smirnov sebesar 0.235. Hal ini menunjukkan 0.235 lebih besar dari $\alpha(0,05)$, sehingga dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas

Nama variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
KM	0.406	2.466
INST	0.420	2.382
KH	0.923	1.083

Sumber : Data Olahan SPSS

Berdasarkan tabel 3, terlihat dari hasil dari uji multikolinearitas diatas menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu kepemilikan manajerial yang diwakili dengan KM, kepemilikan institusional yang diwakili dengan INST, dan kebijakan hutang yang diwakili dengan KH memiliki nilai tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 , yang artinya tidak ada terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi ini.

Uji Autokorelasi

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi

Nilai DW	Nilai D1	Nilai Du	4-d1	4-dU	Kesimpulan
1.827	1.357	1.661	2.642	2.338	Tidak Mengandung Autokorelasi

Sumber : Data Olahan SPSS

Berdasarkan tabel Durbin Waston diatas diketahui bahwa nilai DurbinWaston hitung sebesar 1,827. Apabila dibandingkan dengan nilai Durbin-Waston tabel pada tingkat signifikan 5%, dengan k=4 dan n=42 maka diperoleh dl = 1.35733 dan du = 1,66172, maka nilai 4-du = 2.33828 dan nilai 4-dl = 2,64267. Hasil dari Durbin-Waston hitung sebesar 1.827 dan nilai ini berada diposisi antara du dengan 4-du, yaitu antara 1,66172 dan 2.33828, yang artinya bahwa tidak adanya gejala autokorelasi dalam model regresi ini.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 5
Hasil Uji Glejser

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.008	.029		.288	.775
KM	.006	.030	.046	.206	.838
INST	.046	.029	.345	1.580	.122
KH	.081	.052	.230	1.558	.128

Sumber : Data Diolah SPSS

Berdasarkan hasil uji Glejser, maka dapat terlihat bahwa tingkat signifikan untuk masing-masing variabel independen adalah diatas tingkat kepercayaannya sebesar 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel – variabel independen yang diantaranya adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kebijakan hutang. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu *tax aggressive*.

Tabel 6
Hasil Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	-.057	.052	
KM	.136	.053	.394
INST	.109	.052	.317
KH	.269	.093	.294

Sumber : Data Olahan SPSS

Persamaan regresi sebagai berikut :

$$ETR_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 KM_{i,t} + \beta_2 INST_{i,t} + \beta_3 KH_{i,t} + e_{it}$$

$$ETR_{i,t} = -0.057 + 0.136 KM + 0.109 INST + 0.269 KH + e_{it}$$

Artinya angka-angka dalam persamaan regresi diatas:

1. Konstanta (β_0) sebesar -0.057 diatas artinya tanpa adanya variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kebijakan hutang, maka *tax aggressive* akan turun sebesar 0,057. Hal ini dapat dilihat dari koefisien konstantanya yang bernilai negative.
2. Koefisien regresi untuk variabel X1 sebesar 0.136 dapat

menunjukkan arti jika kepemilikan oleh pihak manajerial dinaikkan sebesar 1 % dan variabel yang lain tetap, maka akan dapat menyebabkan tax aggressive itu akan naik sebesar 0.136. Sehingga, koefisien dari kepemilikan manajerial tersebut akan dapat menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kepemilikan manajerial dengan tax aggressive.

3. Koefisien regresi untuk variabel X2 sebesar 0.109, mempunyai arti jika kepemilikan institusional dinaikkan sebesar 1 % dan variabel yang lainnya tetap, maka tax aggressive naik sebesar 0.109. Sehingga koefisien kepemilikan oleh institusional menunjukkan terdapat hubungan antara kepemilikan institusional dengan tax aggressive.
4. Koefisien regresi untuk variabel X3 sebesar 0.269, yang artinya jika kebijakan hutang dinaikkan sebesar 1 % dan variabel lain tetap, maka tax aggressive akan naik sebesar 0.269. Koefisien kebijakan hutang menunjukkan terdapat hubungan antara kebijakan hutang dengan tax aggressive.

Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Pada uji signifikan parsial (uji t) dapat digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas. Pengujian ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. Apabila nilai t hitung > nilai t tabel, maka akan menyebabkan Ho ditolak dan Ha diterima. Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa diketahui nilai t tabel dengan df= 38, dengan tingkat signifikan $\alpha/2$ adalah sebesar 2.024.

Hasil uji t dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 7
Hasil Uji Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-.057	.052		-1.099	.279
1 KM	.136	.053	.394	2.563	.014
INST	.109	.052	.317	2.097	.043
KH	.269	.093	.294	2.884	.006

Sumber : Data Olahan SPSS

Berdasarkan dari hasil uji signifikan parsial (uji t) pada tabel 7 diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada Uji Parsial untuk variabel kepemilikan manajerial, dapat dilihat pada tabel 7, dimana dapat dilihat bahwa terdapat hasil dari nilai t hitung dari kepemilikan manajerial yaitu sebesar 2.563, berarti $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,563 > 2,024$) dan tingkat signifikannya sebesar 0,014 lebih kecil dari 0,05 maka hal ini dapat membuktikan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi, hal ini dapat menunjukkan pula bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressive*.
2. Pada Uji Parsial untuk variabel kepemilikan institusional dapat dilihat pada tabel 7, terdapat hasil dari nilai t hitung untuk variabel kepemilikan institusional sebesar 2.097, berarti $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,097 > 2,024$) dan pada tingkat signifikannya sebesar 0,043 lebih kecil dari 0,05 maka hal ini dapat membuktikan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi, dari pengujian ini dapat menunjukkan

bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressive*.

3. Pada uji Parsial untuk variabel kebijakan hutang dapat dilihat pada tabel 7, dimana dapat dilihat bahwa hasil dari nilai t hitung untuk variabel kebijakan hutang sebesar 2.884, berarti $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,884 > 2,024$) dan tingkat signifikannya sebesar 0,006 lebih kecil dari 0,05 maka hal ini membuktikan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi, hal ini dapat menunjukkan bahwa kebijakan hutang berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressive*.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Tabel 8
Hasil Uji Simultan

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.782	3	.261	22.099	.000 ^b
1 Residual	.448	38	.012		
Total	1.231	41			

Sumber: Data Olahan SPSS

Berdasarkan pada tabel 8 maka dapat diketahui bahwa F hitung sebesar 22.099 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0.05. Pengujian dilakukan berdasarkan hipotesis yang ada dengan tingkat signifikan sebesar 0,05, df 1 (jumlah variabel-1) = 3, dan df 2 ($n-k-1$) = 37. Dari hasil tersebut diketahui F tabel sebesar 2.859.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa F hitung $>$ F tabel yaitu $22.099 > 2.859$, sehingga variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan kebijakan hutang berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap *tax aggressive*.

Uji Koefisien Determinasi

Diuji koefisien determinasi digunakan untuk menguji goodness of-fit dari model regresi, yaitu seberapa besar pengaruh variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen).

Tabel 9
Uji koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.797 ^a	.636	.607	.1086338	1.827

Sumber : Data Olahan SPSS

Berdasarkan tabel 9 diatas dapat dilihat bahwa nilai dari Adjusted R Square sebesar 60.7% artinya sebesar 60.7% variasi variabel terikat dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel bebas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sebesar 60.7% *tax aggressive* dapat dipengaruhi oleh variabel-variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kebijakan hutang. Sedangkan sisanya itu sebesar 39.3% yang dapat dipengaruhi oleh variabel-variabel lain selain variabel – variabel yang sudah digunakan dalam model penelitian ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepemilikan manajerial terbukti berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressive*. Jadi, besarnya kepemilikan manajerial didalam perusahaan membuat manajerial dapat memanfaatkan peluang untuk melakukan *tax aggressive* agar mendapatkan keuntungan atau laba yang lebih besar.
2. Kepemilikan institusional telah terbukti berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressive*. Jadi, besarnya kepemilikan pada pihak institusional dapat menyebabkan dukungan yang besar untuk melakukan *tax aggressive*, karena adanya keinginan untuk mensejahterakan diri sendiri tanpa memikirkan rusaknya citra perusahaan.
3. Kebijakan hutang terbukti berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressive*. Apabila suatu perusahaan itu menggunakan pendanaan operasional untuk perusahaannya dari hutang maka akan mengurangi penghasilan bruto yang akan menimbulkan beban bunga yang kecil, dan menyebabkan akan terjadinya tindakan *tax aggressive*.

Saran

Dari simpulan diatas, maka diperlukan adanya saran untuk dapat mengembangkan penelitian ini. Adapun sarannya adalah sebagai berikut :

1. Khususnya bagi perusahaan agar dapat menjadi bahan untuk bisa menambah pengetahuan dan wawasan tentang *tax aggressive*,

sehingga manajemen perusahaan bisa merancang mekanisme dalam pelaksanaan kelanjutan perusahaan dengan baik, dengan tidak melakukan perencanaan pajak yang illegal atau dapat disebut dengan *tax evasion* sehingga perusahaan tidak melakukan kecurangan pajak dengan *tax evasion* yang dapat merugikan Negara dan dapat merusak nama dan reputasi perusahaan tersebut di mata publik.

2. Untuk penelitian selanjutnya, pada tahun-tahun pengamatan sebaiknya dapat diperpanjang dan dapat menambah jumlah perusahaan yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian itu serta dapat menggunakan beberapa pengukuran lain yaitu dengan diukur menggunakan tiga proksi perhitungan yaitu GAAP *effective tax rate* (GETR), *current effective tax rate* (CuETR), dan *book-tax difference* (BTD).

DAFTAR PUSTAKA

- Baharuddin, Jeffry. 2015. Pengaruh Karakteristik Eksekutif, dan Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*.(Skripsi). Surabaya: Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Pendidikan*. Yogyakarta: Erlangga.
- Besley, S. dan E.F. Brigham. 2007. *Essentials of Manajerial Finance*. US: South- Western Pub.

- Fitrios, Ruhul dan Rusli, 2007. *Pengantar Hukum Pajak*. Pekanbaru: Unri Press.
- Frank, M., Lynch,L., dan Rego,S. 2008. *Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting*. The Accounting Review. Vol. 84.
- Hartadinata, Okta Shindu dan Heru Tjaraka. 2013. Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Hutang, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Aggressiveness*.(Journal).Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.
- Khurana, Inder K dan William J Moser. 2009. *Institutional Ownership and Tax Aggressiveness*. Columbia: University of Missouri.
- Pranata, Febri Mahudi dkk. 2014. Pengaruh Karakteristik Eksekutif dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*.(Journal). Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta.
- Sabrina, Anita dan Gatot Soepriyanto. 2013. Analisis Karakteristik *Corporate Governance* Terhadap Tindakan Pajak Agresif. (Journal). Jakarta Barat: Fakultas Ekonomi Bina Nusantara.
- Sari, Dewi Kartika dan Dwi Martani. 2010. Karakteristik Kepemilikan Perusahaan, *Corporate Governance*, dan Terhadap Pajak Agresif. (Journal). Depok: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Tandelilin, Eduardus. 2010. *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi Edisi Pertama*. Yogyakarta: Kanisius.
- <http://winpoin.com/microsoft-didenda-1-7-trilyun-karena-melakukan-penggelapan-pajak/>. Diakses pada 1 Maret 2015.Pukul 22:03 WIB.
- <http://www.beritarayaonline.com/2013/05/pencapaian-laba-bersih-emiten.html>. Diakses pada 29 Maret 2015. Pukul 20:58 WIB.